
Implementasi SIASN Dalam Digital Era Governance: Tinjauan Sistematis Transformasi Layanan Manajemen ASN

Lasmaria Agustina¹, Asropi²

¹Politeknik STIA LAN Jakarta

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: lasmaria.agustina@bkn.go.id , asropi@upnvj.ac.id

*Corresponding author: lasmaria.agustina@bkn.go.id

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 10-05-2026

Revisi: 10-06-2026

Disetujui: 01-07-2026

Publish online: 03-07-2026

Studi ini meneliti implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai inovasi tata kelola digital dalam sistem manajemen personel publik Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIASN dari perspektif Tata Kelola Era Digital (DEG), mengidentifikasi dampaknya pada layanan personel, mengeksplorasi tantangan implementasi, dan mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk meningkatkan praktik tata kelola digital. Studi ini menggunakan Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) mengikuti pedoman PRISMA. Dua puluh artikel empiris yang diindeks dalam basis data Sinta dan Scopus yang diterbitkan antara tahun 2022–2026 dipilih secara sistematis dan dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik. Temuan menunjukkan bahwa SIASN memberikan kontribusi signifikan terhadap integrasi administrasi, efisiensi layanan, transparansi, dan pengurangan prosedur manual melalui prinsip Reintegrasi dan Holisme Berbasis Kebutuhan. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk masalah sinkronisasi data, kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, ketidakstabilan sistem, dan resistensi organisasi terhadap transformasi digital. Studi ini mengusulkan Kerangka Kematangan Tata Kelola Digital SIASN yang mengintegrasikan dimensi teknologi, organisasi, dan tata kelola dalam perspektif DEG. Studi ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperluas konsep Tata Kelola Era Digital ke dalam sistem kepegawaian publik dan secara praktis dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan layanan publik digital di Indonesia.

Kata Kunci SIASN, Tata Kelola Digital, Tata Kelola Era Digital, Layanan Personalia, Tinjauan Literatur Sistematis.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the State Civil Service Information System (SIASN) as a digital governance innovation in Indonesia's public personnel management system. The study aims to analyze the SIASN implementation from the perspective of Digital Era Governance (DEG), identify its impacts on personnel services, explore implementation challenges, and propose a conceptual framework to improve digital governance practices. This study employed a Systematic Literature Review (SLR) following PRISMA guidelines. Twenty empirical articles indexed in the Sinta and Scopus databases, published between 2022–2026, were systematically selected and analyzed using

thematic synthesis techniques. The findings indicate that SIASN contributes significantly to administrative integration, service efficiency, transparency, and the reduction of manual procedures through the principles of Reintegration and Need-based Holism. However, several challenges remain, including data synchronization issues, digital literacy disparities, infrastructure limitations, system instability, and organizational resistance to digital transformation. This study proposes a SIASN Digital Governance Maturity Framework that integrates technological, organizational, and governance dimensions within the DEG perspective. The study contributes theoretically by extending Digital Era Governance concepts into public personnel systems and practically by providing policy recommendations to improve digital public services in Indonesia.

Keywords: SIASN, Digital Governance, Digital Era Governance, Personnel Services, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi agenda strategis pemerintah untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, agenda tersebut dilembagakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Badan Kepegawaian Negara mengembangkan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN sebagai sistem berbagi pakai untuk mendukung layanan manajemen ASN secara nasional. Laman resmi BKN menunjukkan bahwa SIASN mencakup berbagai macam jenis layanan kepegawaian, antara lain layanan penetapan NIP, peremajaan data, kenaikan pangkat, pindah instansi, pengajuan banding ASN, penilaian kinerja, kenaikan jabatan, pencantuman gelar, status-kedudukan kepegawaian, sampai dengan layanan purna bakti. Di bawah ini merupakan beberapa layanan kepegawaian yang difasilitasi pada SIASN BKN.



Gambar 1. Layanan Kepegawaian SIASN

Sumber: SIASN BKN

SIASN menjadi penting karena layanan kepegawaian ASN selama ini tidak hanya menuntut kecepatan administratif, tetapi juga keakuratan data dan kemudahan layanan yang terintegrasi. Dalam layanan kenaikan pangkat, contohnya, setelah BKN menerbitkan pertimbangan teknis pada aplikasi SIASN, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat secara otomatis dirancang dan diterbitkan pada SIASN sehingga PPK tidak perlu lagi membuat SK secara manual. Selain itu, dengan adanya inovasi pada periodisasi kenaikan pangkat pada tahun 2025, di mana usulan kenaikan pangkat menjadi 12 kali dalam setahun, hal ini mendukung percepatan dalam layanan manajemen ASN yang dilakukan melalui satu sistem berbagi pakai antara BKN dan seluruh instansi. Dalam layanan status dan kedudukan kepegawaian, BKN juga menegaskan bahwa pengusulan dan penetapan status kepegawaian dapat diproses melalui SIASN tanpa harus datang langsung ke kantor BKN, sehingga layanan diharapkan lebih cepat, lancar, dan akuntabel.

Secara konseptual, SIASN BKN merupakan sebuah inovasi dari digital governance itu sendiri dan bukan sekadar aplikasi digital. Digital governance menekankan penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses pemerintahan, memperkuat integrasi data, meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Literatur digital governance yang ditelaah dalam kajian ini menempatkan teknologi sebagai instrumen tata kelola yang harus ditopang oleh kapasitas kelembagaan, regulasi, kualitas data, keamanan informasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Studi Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) tentang digital governance di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama digitalisasi pemerintahan meliputi infrastruktur yang belum merata, literasi digital, keamanan siber, kapasitas SDM, serta integrasi sistem antarlembaga yang belum sepenuhnya harmonis.

Intisari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan dua kecenderungan. Pertama, studi tentang SIASN banyak menyoroti efektivitas layanan tertentu, terutama kenaikan pangkat, pencantuman gelar, mutasi, status dan kedudukan kepegawaian, serta layanan kepegawaian lainnya. Penelitian pada BKD Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa SIASN meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik, tetapi masih menghadapi kendala validitas data, kapasitas SDM, gangguan teknis, dan rendahnya kesadaran ASN dalam pemutakhiran data mandiri. Kedua, penelitian digital governance secara umum sering membahas SPBE, e-government, dan pelayanan publik digital, tetapi belum banyak yang menghubungkan SIASN secara spesifik sebagai inovasi digital governance dalam ekosistem manajemen ASN nasional.

Secara empiris, penelitian terdahulu mengenai implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) di Indonesia umumnya masih bersifat parsial dan terlokalisasi. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada evaluasi teknis operasional sistem di satu instansi tertentu tanpa melakukan kontekstualisasi teoretis yang mendalam (lihat misalnya Kawijaya dkk., 2025; Mufarrih & Anisykurlillah, 2024). Di sisi lain, ulasan mengenai konsep Digital Era Governance (DEG) masih mendominasi ranah konseptual makro dan jarang diuji pada lokus manajemen kepegawaian publik di negara berkembang yang bercirikan kepulauan (Taufiqurokhman dkk., 2025).

Menjembatani kekosongan akademis (research gap) tersebut, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengujian empiris komparatif atas dua pilar utama teori DEG, yaitu Reintegration (reintegrasi sistem hulu) dan Need-based Holism (pelayanan holistik berbasis kebutuhan hilir), yang dioperasikan pada manajemen kepegawaian negara berkembang dengan karakteristik geographical divide (kesenjangan geografis) yang ekstrem.

Penelitian ini tidak hanya memetakan keberhasilan integrasi SIASN di wilayah dengan infrastruktur mapan seperti di bagian barat Indonesia (Utami & Jannah, 2025), melainkan mengomparasikan secara kritis hambatan struktural hulu-hilir yang dihadapi oleh wilayah otonom baru dan pedalaman di bagian timur Indonesia seperti wilayah Papua (Yikwa & Alfian, 2025). Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang holistik, penelitian ini mengonstruksikan sebuah spektrum penjenjangan kematangan digital governance yang inklusif, sehingga memberikan kontribusi teoretis baru bagi diskursus transformasi digital administrasi publik di negara-negara kepulauan yang sedang berkembang.

Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang menyatukan temuan-temuan empiris SIASN dari berbagai layanan dan daerah ke dalam satu analisis sistematis berbasis digital governance. Sebagian penelitian terdahulu bersifat studi kasus lokal, sementara SIASN sendiri merupakan sistem nasional lintas instansi. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis posisi SIASN sebagai inovasi digital governance dalam layanan kepegawaian; kedua, mengidentifikasi dampak SIASN terhadap efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan kepegawaian; ketiga, memetakan masalah aktual implementasi SIASN dalam beberapa tahun terakhir; dan keempat, merumuskan saran perbaikan berbasis hasil SLR.

TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi

Menurut O'Sullivan & Dooley dalam Andi Asari et al. (2023), dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa ciri utama dari inovasi adalah adanya unsur kebaruan yang juga memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda. Robertson (1967) dalam Andi Asari et al. (2023) mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses di mana ide baru, perilaku, atau benda yang secara kualitatif berbeda dari bentuk-bentuk yang ada diimplementasikan dan diterapkan dalam praktik. Menurut Mohr (1969) dalam Andi Asari et al. (2023), inovasi dapat menjadi sumber untuk menciptakan produk atau proses yang baru yang dapat dikembangkan bagi para pengikutnya. Kriteria kebaruan inovasi ditentukan oleh pilihan dan persepsi inovasi pengadopsinya. Artinya, ide, objek, atau praktik dianggap inovatif selama periode persepsinya sebagai kebaruan oleh perwakilan pengadopsi. Dalam konteks ini, juga dipahami bahwa ketersediaan informasi dan pengetahuan tentang inovasi tidak mendistorsi kriteria kebaruan.

Menurut Walker (2006) dalam Andi Asari et al. (2023), inovasi adalah suatu proses di mana ide, objek, dan praktik baru diciptakan, dikembangkan, atau diciptakan kembali untuk unit adopsi. Dengan demikian, pada level kelembagaan, inovasi harus dilihat sebagai proses sosial, bukan sebagai penemuan ilmiah. Itu memungkinkan untuk memperkirakan dampaknya terhadap struktur dan prosedur organisasi, yaitu pengguna. Kemudian, tujuan inovasi adalah penciptaan nilai tambah dan dampak positif pada operasi dan pengembangan organisasi. Oleh karena itu, inovasi dapat mencakup perubahan yang memiliki konsekuensi menguntungkan bagi organisasi. Inovasi itu kompleks, tidak pasti, agak tidak teratur, dan mengalami banyak perubahan. Proses inovasi harus dipandang sebagai rangkaian perubahan yang kompleks, tidak hanya perangkat keras, tetapi juga lingkungan pasar, fasilitas produksi, pengetahuan, dan konteks sosial organisasi inovasi.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) BKN merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola data dengan pemanfaatan teknologi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, mencakup instansi baik pusat maupun daerah. Sistem ini dibuat untuk mengatur keseluruhan siklus manajemen pegawai. Berikut adalah beberapa fungsi dan lingkup utama dari SIASN BKN:

- a. Pengelolaan Data Terpadu: Berfungsi sebagai pusat data dan informasi pegawai yang dirancang secara sistematis sehingga lebih tepat dan terintegrasi.
- b. Layanan Kepegawaian: Mengelola berbagai proses administrasi ASN secara digital dan online, termasuk perencanaan kebutuhan, pengangkatan, mutasi, promosi, dan pengurusan pensiun.
- c. Integrasi Arsip (DMS): Dilengkapi dengan Digital Document Management System (DMS-SIASN) untuk mengatur arsip manajemen ASN dengan cara yang teratur, mudah diakses, dan aman.
- d. Akses Mandiri (MyASN): Menawarkan platform khusus bagi setiap ASN, yaitu MyASN, yang memungkinkan pegawai untuk memperbarui data mereka, melihat riwayat karier, serta memantau layanan kepegawaian mereka dengan lebih transparan

Digital Governance

Akil (2024) memperbarui pemahaman tata kelola digital dengan menekankan bahwa digital governance bukan lagi sekadar alat mekanis pemerintah, melainkan sebuah ruang kolaborasi yang dinamis. Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan tata kelola digital wajib melibatkan hubungan tiga pihak yang produktif dan setara, yaitu:

- Pemerintah (sebagai regulator dan penyedia platform),
- Sektor Swasta (sebagai inovator teknis dan mitra ekonomi), dan

- Masyarakat (sebagai pengguna aktif dan pengawas).
- Sistem ini diwujudkan melalui integrasi *hardware*, *software*, *networking*, dan *brainware* (SDM kompeten) demi menciptakan pelayanan publik yang akuntabel.

Dalam diskusi yang banyak dirujuk pada tahun 2024-2025, Lips (2019) mendefinisikan digital governance sebagai pemanfaatan teknologi dan data digital yang tidak hanya mengubah operasi internal birokrasi, tetapi juga secara fundamental mengubah hubungan antara pemerintah dengan aktor eksternal (warga negara, LSM, pihak swasta, dan organisasi internasional). Teori ini menekankan bahwa digital governance memiliki implikasi luas pada:

- Demokratisasi: meningkatkan transparansi dan akses informasi publik.
- Inovasi Kelembagaan: Menghapus sekat-sekat birokrasi yang kaku (silo bureaucracy) menuju pemerintahan yang adaptif.

Dalam teori Digital Era Governance (DEG) yang diperkenalkan oleh Patrick Dunleavy et al. 2006, Reintegration dan Need-based Holism adalah dua pilar utama—bersama dengan digitalisasi—yang mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan publik dari sistem yang terfragmentasi menjadi sistem yang berpusat pada warga.

1. *Reintegration* (Reintegrasi)

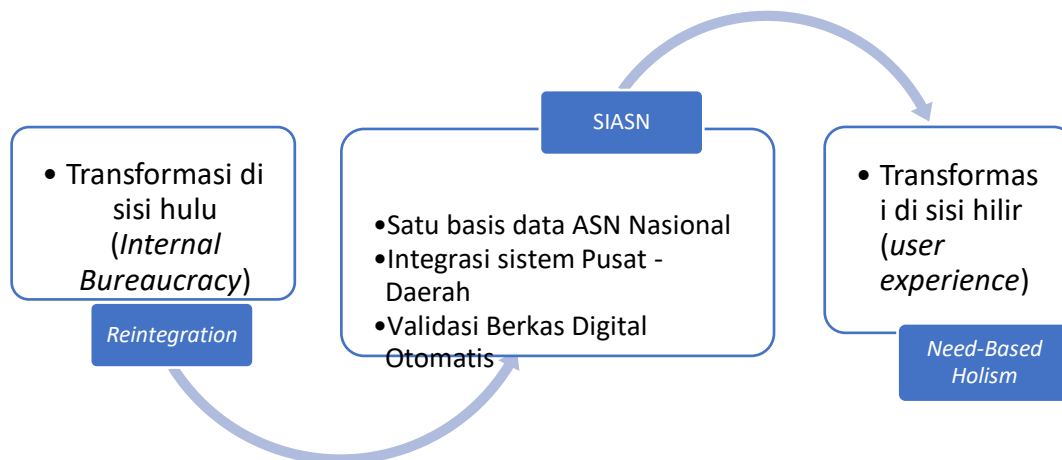
Konsep ini berfokus pada upaya membawa kembali berbagai fungsi, layanan, atau lembaga yang sebelumnya terpisah-pisah ke dalam satu kesatuan kontrol pemerintah. Inti Konsep: Menghilangkan ego sektoral atau silo antardepartemen agar koordinasi lebih mudah dan birokrasi menjadi lebih ramping. Penerapan: Mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu portal digital terpadu. Contohnya adalah pada sistem Satu Data ASN. Satu data ASN adalah wujud transformasi manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju sistem digital. Satu data ASN bertujuan untuk meningkatkan data yang terstandar, akurat, terpadu dan berkualitas serta dilengkapi dengan metadata. Data tersebut didiseminasikan dalam satu portal secara elektronik. Data dengan kualitas tinggi dan terintegrasi dibutuhkan untuk mendukung terbitnya kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang manajemen ASN (Bima, 2021).

2. *Need-based Holism* (Holistik Berbasis Kebutuhan)

Konsep ini mengubah paradigma pelayanan publik dari yang berorientasi pada struktur atau kemauan pemerintah (agency-centric) menjadi berorientasi pada kebutuhan masyarakat (citizen-centric). Inti Konsep: Pemerintah harus melihat kebutuhan warga secara menyeluruh (holistik) berdasarkan peristiwa atau fase kehidupan tertentu, bukan meminta warga mengurus setiap kebutuhan secara terpisah ke departemen yang berbeda. Contoh penerapannya yaitu desain layanan yang intuitif. Misalnya, ketika seorang PNS diusulkan naik pangkat, instansi tidak perlu memintakan lagi dokumentasi pendukung

pengusulan, tetapi semua dokumen dapat diunduh atau diakses melalui satu layanan DMS di SIASN.

Melalui kedua pilar ini, DEG berusaha mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, menghilangkan birokrasi berbelit-belit, dan memastikan setiap kebijakan serta layanan digital benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut integrasi SIASN merupakan perwujudan konkret dari gelombang kebangkitan kembali fungsi kontrol pasca-NPM melalui pilar Reintegration dan Need-based Holism.



Gambar 2. Ilustrasi Kerangka Kerja Transformasi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Manfaat Digital Governance

Berikut merupakan beberapa manfaat dari Digital Governance:

- a. Penciptaan Nilai public dan Inklusivitas Layanan
Digital governance memfasilitasi model ko-produksi (*co-production*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, melainkan juga mitra dalam pembuatan kebijakan. Manfaat utamanya adalah meningkatkan keterlibatan aktif warga (*citizen engagement*) dalam proses pengambilan keputusan serta memastikan pelayanan publik dapat diakses secara inklusif oleh berbagai lapisan masyarakat melalui platform digital terintegrasi.
- b. Efisiensi Operasional Transparansi dan Akuntabilitas
Mengurangi birokrasi yang berbelit-belit (*red tape*) dan menghapus sekat antarinstansi (*silo-bureaucracy*). Dari sisi pengawasan, digitalisasi proses administrasi menciptakan jejak digital yang transparan. Hal ini mempersempit ruang gerak maladministrasi dan korupsi, sekaligus mempermudah lembaga pengawas (seperti Ombudsman) serta masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah secara real-time.
- c. Pembuatan Kebijakan Berbasis Data (*Evidence-Based Policy*)

Dengan tata kelola berbasis data (*data-driven governance*) dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data besar (*big data*) publik untuk merancang kebijakan yang proaktif dan prediktif (misalnya mitigasi bencana, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan perencanaan tata kota), bukan sekadar responsif.

Tantangan Digital Governance

Tantangan Digital Governance dalam 3 tahun terakhir telah bergeser dari masalah "ketersediaan komputer" menjadi masalah etika, keamanan, dan kesenjangan kapasitas.

- a. Kesenjangan Digital Kognitif (*The Digital Divide*) dan Literasi
Tantangan terbesar bukan lagi sekadar infrastruktur (jaringan internet), melainkan kategori kedua dari kesenjangan digital, yaitu kesenjangan literasi digital. Banyak kelompok rentan (lansia, masyarakat daerah tertinggal, masyarakat berpenghasilan rendah) yang memiliki akses gawai tetapi tidak memiliki kemampuan kognitif untuk memanfaatkan aplikasi layanan pemerintah secara optimal.
- b. Kedaulatan Data, Keamanan Siber (*Cybersecurity*), dan Privasi
Integrasi seluruh data publik ke dalam *Super-Apps* atau Pusat Data Nasional (PDN) memicu risiko keamanan siber yang masif (seperti serangan ransomware dan kebocoran data massal). Tantangannya adalah bagaimana pemerintah membangun regulasi tata kelola data yang etis, aman, dan menjaga privasi warga negara sesuai dengan standar global perlindungan data.
- c. Resistensi Budaya Birokrasi (*Institutional Resistance*) dan Krisis "*Brainware*"
Transformasi digital sering kali terhambat oleh budaya organisasi sektor publik yang kaku. Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menunjukkan resistensi untuk mengubah cara kerja konvensional ke digital. Selain itu, terdapat kelangkaan talenta digital (*brainware*) berkualitas tinggi di dalam tubuh pemerintahan karena kalah bersaing secara remunerasi dengan sektor swasta.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

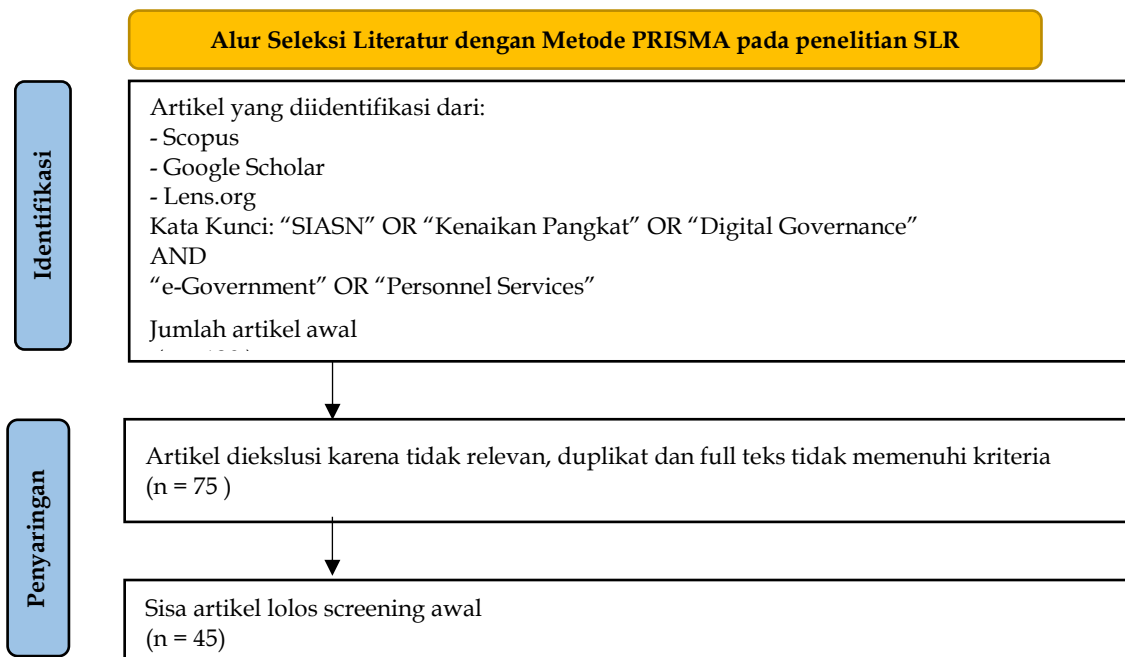
Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Literatur Sistematis atau Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 artikel empiris terindeks Sinta/Scopus pada rentang tahun 2022–2026. SLR dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan merangkum literatur, tetapi juga menyintesis pola temuan, kesenjangan, dan rekomendasi dari berbagai studi tentang SIASN dan digital governance. Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan sistematis. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan utama dalam pelaksanaan metode SLR dimulai dengan mendefinisikan permasalahan dan tujuan tinjauan literatur (B. Kitchenham, 2004).

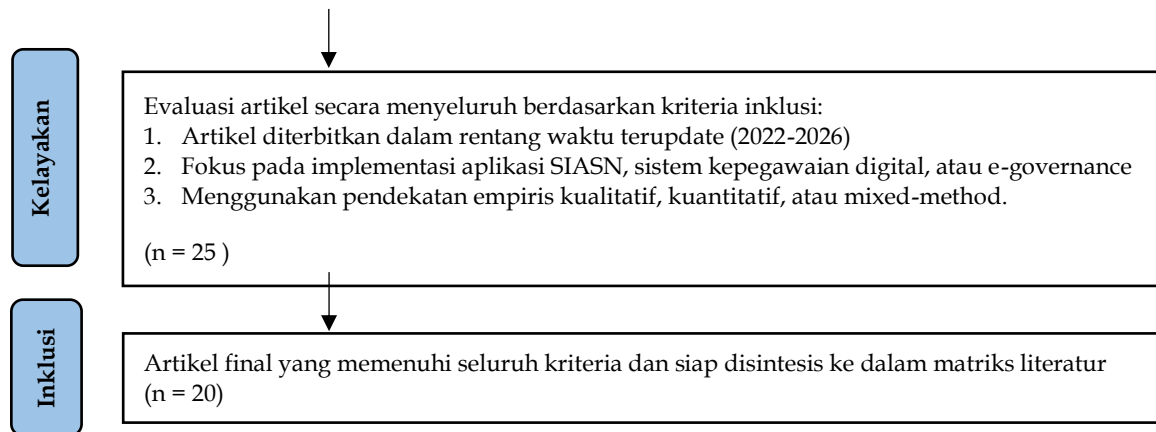
Analisis dilakukan melalui empat tahap: identifikasi literatur, seleksi literatur, ekstraksi temuan, dan sintesis tematik. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi: inovasi layanan, efisiensi proses, transparansi dan akuntabilitas, integrasi data, kapasitas SDM, infrastruktur, fitur sistem, keamanan informasi, serta dukungan helpdesk.

Artikel ilmiah yang menjadi sumber data dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu artikel yang membahas SIASN dalam digital governance, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2022–2026), serta artikel yang menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi artikel yang memenuhi kriteria relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Artikel-artikel ini dianalisis untuk memperoleh informasi yang terkait dengan metode, penerapan, dan faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan SIASN dalam layanan kepegawaian.

Diagram Alur Seleksi Data

Proses pencarian dan seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti panduan protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel dari database Scopus, Google Scholar dan Lens.org. Langkah seleksi artikel dari total database hingga diperoleh artikel final yang relevan digambarkan pada alur berikut: Tahap identifikasi adalah pencarian artikel dengan cara memasukkan kata kunci: “SIASN”, “kenaikan pangkat”, “digital governance”, “e-government”, “personnel services”. Dibawah ini merupakan Diagram alur PRISMA 2020 untuk tinjauan sistematis yang hanya mencakup pencarian basis data dan register.





Gambar 3. Diagram Alur Seleksi Data

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, berdasarkan Panduan Page MJ, et al., 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Ekstraksi dan Pemetaan Literatur (SLR)

Berdasarkan protokol Systematic Literature Review (SLR) yang telah ditetapkan pada bagian Metode Penelitian, dilakukan ekstraksi terhadap 20 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi. Pemetaan literatur ini diklasifikasikan secara tematis untuk melihat tren fokus penelitian, lokus evaluasi, serta metodologi yang dominan digunakan dalam mengkaji transformasi digital manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tata kelola digital (digital governance) secara makro.

Secara metodologis, mayoritas studi yang mengkaji aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) secara spesifik menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (N=13), disusul oleh pendekatan konseptual/tinjauan literatur (N=5), dan mixed-methods atau kuantitatif (N=2). Temuan ini mengindikasikan bahwa evaluasi implementasi sistem kepegawaian digital di Indonesia saat ini masih berada pada fase eksplorasi mendalam untuk memahami dinamika hambatan lapangan, perilaku adaptasi organisasi, dan fenomena implementasi kebijakan.

Tabel 1. Matriks Sintesis Jurnal

No.	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Metode Penelitian	Temuan Utama/ Hasil Penelitian
1.	Kawijaya, Samad, & Sawaji (2025)	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Kenaikan Pangkat Pada BKPSDM Kabupaten Gowa	Kualitatif Deskriptif & Analisis SWOT	Aplikasi SIASN terbukti efektif dan efisien dalam mempercepat prosedur usulan kenaikan pangkat (dari 4 bulan menjadi <1 bulan) serta menciptakan transparansi data. Namun, terdapat hambatan teknis berupa pembatasan ukuran berkas digital (maksimal 2MB), kegagalan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 81-103

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.533>

				migrasi riwayat data gelar, dan ketidakterediaan jaringan internet di wilayah geografis dataran tinggi.
2.	Heriyanto (2022)	Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik	Kualitatif (SLR)	Penerapan e-government di Indonesia merupakan instrumen wajib untuk memangkas birokrasi konvensional, meminimalkan maladministrasi, serta menyediakan layanan publik yang dapat diakses 24/7. Keberhasilannya sangat bertumpu pada 3 elemen sukses: support (regulasi dan political will), capacity (finansial dan infrastruktur IT), serta value (kemanfaatan nyata bagi masyarakat).
3.	Abdussamad, Judijanto, Yusup, Tamrin, Rosyalita, & Rahayu (2024)	Enhancing Public Service Delivery through Digital Transformation: Challenges and Opportunities in the Era of E-Government	Mixed Methods dan Regresi Linier	Digitalisasi meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan secara signifikan di kota-kota besar (sekitar 80% layanan berbasis daring). Melalui analisis regresi, ditemukan bahwa faktor kepercayaan pengguna terhadap keamanan data memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepuasan layanan dengan nilai $R^2 = 0,844$. Kendala utama yang masih membayangi adalah kesenjangan digital (digital divide) di daerah rural (terpencil).
4.	Lynn et al. (2022)	Digital Public Services	Studi Konseptual & Tinjauan Literatur (EU eGovernment Framework)	Transformasi digital mengubah esensi mendasar dari tata hubungan pelayanan publik (the public encounter) menjadi lebih mandiri (citizen self-service). Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan pemrograman pembelajaran mesin (machine learning) menawarkan kepastian waktu tunggu yang lebih pendek, namun membawa risiko baru berupa bias algoritma yang berpotensi memicu eksklusi digital kelompok tertentu.
5.	Khafidho, Fanidah, Meirinawati, & Nourmanita (2026)	Efektivitas Layanan Digitalisasi Pada Aplikasi SIASN Dalam Proses Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di BKD Kabupaten Sidoarjo	Kualitatif Deskriptif (Teori Efektivitas Zafirah 2022)	Layanan SIASN dinilai cukup efektif meningkatkan produktivitas kerja pegawai dan memangkas dokumen fisik secara signifikan (paperless). Meskipun proses usulan menjadi lebih transparan, terdapat kendala internal berupa lemahnya validitas sinkronisasi data kepegawaian nasional serta rendahnya kesadaran ASN dalam melakukan pemutakhiran data secara mandiri (MyASN).
6.	Utami & Jannah (2025)	Evaluation of the E-Government Policy for the Civil Service Information System (Siap) in the Bekasi City Government	Kualitatif Deskriptif (Model Evaluasi CIPP Stufflebeam)	Evaluasi terhadap Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi menunjukkan performa yang baik pada aspek Context, Input, dan Process. Hambatan ditemukan pada elemen Product, di mana terjadi penurunan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tahun 2020 hingga 2023 menjadi 83.65. Hal ini disebabkan oleh belum

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 81-103

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.533>

	Environment		optimalnya stabilitas sistem aplikasi kepegawaian daerah saat diintegrasikan dengan sistem nasional.
7.	Fitriyanti (2024) The Effect of Digital Transformation on Governance in Indonesia: A Case Study of e-Government Implementation in Public Services	Kualitatif Deskriptif & Studi Kasus Perbandingan Regional	E-government mempercepat transparansi birokrasi dan memotong rantai pungutan liar secara instan di wilayah perkotaan (seperti Jakarta dan Surabaya). Sebaliknya, instansi publik di Indonesia Timur menghadapi hambatan integrasi antardepartemen (interdepartmental integration) akibat infrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan rendahnya literasi digital aparatur daerah.
8.	Danu, Supardi, Sutanto & Riko (2023) E-Services: Implementation of Digital-Based Public Services in The 4.0 Era	Kualitatif Deskriptif & Rekayasa Desain Sistem Portal Desa	Pengembangan inovasi e-services (seperti aplikasi disposisi surat digital di Sriharjo) sukses mengubah interaksi birokrasi tingkat desa menjadi transparan dan mudah diakses. Hambatan melambatnya akselerasi e-government di tingkat desa sejak Inpres No. 3 Tahun 2003 disebabkan oleh nihilnya standardisasi desain aplikasi yang baku dan kultur organisasi lokal yang resisten terhadap perubahan sistem digital.
9.	Syafa Kamila Ardyaputri & Darmeinis (2024) Peran Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK dalam Mendukung Efisiensi Operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Kualitatif Deskriptif, Studi Lapangan di BKN Pusat	Sebelum penerapan SIASN, pengelolaan dokumen status kepegawaian (CLTN, perbaikan nama, rekomendasi tewas) dilakukan manual lewat pengiriman hard file fisik yang rawan terselip, memakan waktu lama, dan tidak efisien. Pasca implementasi SIASN Layanan SKK, proses bisnis terintegrasi penuh secara digital mulai dari input, verifikasi berkas tidak lengkap (BTL), hingga penerbitan TTE (Tanda Tangan Elektronik) Kepala BKN.
10.	Iqbal N, Hasanudin, & Marta (2024) Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	Kualitatif Deskriptif, Studi Kasus BKN Kanreg XII Pekanbaru	Inovasi aplikasi SIASN merupakan instrumen wajib dalam menunjang Reformasi Birokrasi Tematik bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Kendati sistem ini memotong waktu tunggu pelayanan pensiun dan kepegawaian secara radikal, operasionalnya dinilai belum maksimal 100% akibat masih seringnya ditemukan data berkas yang tidak lengkap dari instansi daerah (pemda) dan kurangnya sosialisasi berkala saat aplikasi melakukan pembaruan fitur (system upgrade).
11.	Mufarrija h & Anisykurlillah Implementasi Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat Berbasis SIASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten	Kualitatif Deskriptif	Kebijakan layanan kenaikan pangkat berbasis SIASN berdasarkan Peraturan BKN No. 7/2023 berjalan baik dan mewujudkan sistem administrasi kepegawaian nirkertas (paperless). Namun, akselerasi terkendala oleh kurangnya

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 81-103

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.533>

	(2024)	Sidoarjo		pemahaman ASN terhadap prosedur mandiri MyASN serta kendala sinkronisasi data riwayat lama.
12.	Marasut, Liando, & Monintja (2025)	The Existence of the State Civil Apparatus Information System (SIASN) in the Process of Determining the Decree on Promotion of Civil Servants in Agencies in the Work Area of the Regional Office XI BKN Manado	Kualitatif Deskriptif	Eksistensi SIASN secara signifikan memotong rantai birokrasi konvensional dalam penetapan SK Kenaikan Pangkat di Kanreg XI BKN Manado. Kendala keterlambatan yang masih muncul bukan pada sistem aplikasi utamanya, melainkan kelambatan verifikasi berkas pendukung digital tingkat instansi daerah (operator level).
13.	Fadillah (2025)	Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Dalam Proses Kenaikan Pangkat Pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung	Deskriptif Kualitatif (Pendekatan Normatif & Empiris)	Penerapan SIASN di Dinas Kominfo Provinsi Lampung dinilai efektif karena didukung oleh regulasi yang kuat dan komitmen pimpinan. Hambatan utama bersumber pada faktor teknis operasional (kegagalan sistem saat traffic tinggi) dan kurangnya sosialisasi berkala bagi seluruh pegawai.
14.	Sirait, Panjaitan, & Manalu (2024)	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Dalam Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan	Kualitatif Deskriptif (Teknik Triangulasi Data)	Penerapan aplikasi SIASN untuk usulan pangkat periode 1 Oktober sukses mendorong efisiensi waktu kerja dinas. Faktor penghambat utama yang ditemukan mencakup terbatasnya jumlah pegawai operator yang kompeten di bidang IT serta masalah gangguan jaringan internet lokal.
15.	Yikwa & Alfian (2025)	Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan	Kualitatif Deskriptif (Teori Implementasi George Edward III)	Terdapat kesenjangan (gap) yang besar antara regulasi nasional dan kesiapan lokal di daerah otonom baru (Mamberamo Tengah). Berdasarkan aspek sumber daya (resources), implementasi SIASN belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur listrik/internet yang ekstrem serta kapasitas SDM aparatur yang sangat rendah.
16.	Sangaji & Irianto (2025)	Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital	Kualitatif Deskriptif	Digitalisasi pelayanan merupakan proses integratif teknologi informasi demi mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan (Good Governance). Keberhasilan jangka panjang memerlukan perubahan kultur kerja organisasi dari cara-cara manual tradisional

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 81-103

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.533>

				menuju adopsi platform digital yang berorientasi pada kepuasan pengguna.
17.	Sandang, Bahri, & Juharni (2025)	Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pada Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN Kabupaten Morowali Utara	Kualitatif Desain Deskriptif Analitis	Implementasi SIASN di BKPSDM Kabupaten Morowali Utara telah mampu mengoptimalkan pelayanan administrasi. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan diperlukannya pelatihan intensif bagi operator instansi guna meminimalkan kesalahan input data dokumen yang menyebabkan status Berkas Tidak Lengkap (BTL).
18.	Hanisch, Goldsby, Fabian, & Oehmichen (2023)	Digital Governance: A Conceptual Framework and Research Agenda	Studi Konseptual / Tinjauan Literatur Teoretis	Menyusun tipologi tata kelola digital ke dalam tiga model utama: analog, augmented, dan automated governance. Penelitian ini menekankan pentingnya mendesain mekanisme kontrol, koordinasi, insentif, dan keamanan data makro untuk mengatasi risiko pemanfaatan teknologi digital di dalam organisasi.
19.	Murdhani (2025)	The Implementation of Digital Governance in Indonesia: A Systematic Review of Challenges and Opportunities	Systematic Literature Review (SLR)	Pelaksanaan Digital Governance di Indonesia menunjukkan kemajuan regulasi lewat Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Peluang pengembangannya sangat besar, namun dibayangi oleh tantangan klasik berupa kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, ancaman keamanan siber (cybersecurity), serta literasi digital publik yang tidak merata.
20.	Taufiqurrahman, Satispi, Andriyani, Usni, & Ulum (2025)	Digital Governance Models in Developing Countries and the Effectiveness of Public Services	Studi Kasus Komparatif Kualitatif (Thematic Analysis)	Membandingkan tata kelola digital di tiga ibu kota negara berkembang (Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila). Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas layanan publik yang prima sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan infrastruktur digital, regulasi perlindungan data yang kuat, serta kapasitas institusional yang adaptif.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tema dominan yang diidentifikasi dalam literatur berkaitan dengan efisiensi layanan (90%), yang menunjukkan bahwa implementasi SIASN sebagian besar dianggap sebagai alat percepatan administratif dan bukan sekadar inovasi teknologi.

Tabel 2. Sintesis Tematik

Tema	Jumlah Artikel	Presentase
Efisiensi layanan	18	90%
Integrasi data	15	75%

Transparansi	14	70%
Kualitas SDM	14	70%
Infrastruktur	12	60%
Literasi digital	11	55%
Keamanan data	9	45%

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Pembahasan Sintesis Lintas Literatur

Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, pembahasan hasil sintesis terhadap 20 literatur ini dikelompokkan ke dalam dua klaster teoretis utama: (1) Paradigma Reintegration dalam Mengatasi Fragmentasi Birokrasi, dan (2) Implementasi Need-Based Holism dalam Siklus Hidup Pelayanan ASN beserta tantangan makro Digital Governance.

Pilar Reintegration: Solusi Radikal atas Silo Administrasi Kepegawaian

Salah satu temuan paling konsisten di antara literatur yang dianalisis adalah keberhasilan platform SIASN dalam mereformasi birokrasi digital konvensional (siloed systems). Sebelum adanya integrasi nasional ini, administrasi kepegawaian di Indonesia didefinisikan sebagai fragmentasi sistem lokal yang rawan memicu redundansi data dan inefisiensi birokrasi. Studi yang dilakukan oleh Syafa Kamila & Darmeinis (2024) di BKN Pusat memberikan bukti empiris bahwa sebelum penerapan SIASN Layanan SKK (Status dan Kedudukan Kepegawaian), pengelolaan dokumen seperti perbaikan nama dan rekomendasi tewas dilakukan secara manual melalui pengiriman berkas fisik yang tidak efisien. Pemotongan rantai birokrasi konvensional pasca-integrasi ini juga divalidasi oleh Marasut dkk. (2025) di Kantor Regional XI BKN Manado, yang menyatakan bahwa eksistensi SIASN secara signifikan memotong waktu penetapan SK Kenaikan Pangkat. Dalam konteks pemerintah daerah, Kawijaya dkk. (2025) di BKPSDM Kabupaten Gowa menunjukkan data konkret bahwa prosedur usulan kenaikan pangkat terpankas secara signifikan, yang semula memakan waktu 4 bulan menjadi kurang dari 1 bulan.

Secara teoretis, transformasi ini merepresentasikan apa yang dijelaskan oleh Hanisch dkk. (2023) dalam kerangka Digital Governance sebagai transisi dari model tata kelola analog menuju augmented atau automated governance, di mana mekanisme koordinasi dan kontrol tidak lagi bertumpu pada interaksi fisik melainkan pada validasi data digital otomatis berbasis aturan (rule-based digital validation). Penguatan aspek regulasi, seperti Peraturan BKN No. 7 Tahun 2023 yang melandasi SIASN, menurut Fadillah (2025) di Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, menjadi faktor pendukung utama (pilar support) yang memberikan kepastian hukum bagi integrasi data horizontal pada instansi pusat maupun daerah.

Sintesis lintas-literatur ini menegaskan bahwa pilar Reintegration (Reintegrasi) sukses mengubah birokrasi menjadi sistem paperless yang transparan dan efisien, meminimalkan

maladministrasi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean and good governance) sebagaimana diuraikan secara konseptual oleh Heriyanto (2022).

Pilar Need-Based Holism: Akselerasi Layanan Mandiri dan Tantangan Makro Lapangan

Integrasi infrastruktur di sisi hulu (Reintegration) secara langsung menopang pergeseran paradigma pelayanan di sisi hilir menjadi lebih berpusat pada manusia (user-centric), yang disebut sebagai pilar Need-Based Holism (Holisme Berbasis Kebutuhan). Dalam pilar ini, layanan administrasi kepegawaian tidak lagi dipandang sebagai urusan transaksional yang terpisah-pisah, melainkan dirancang sebagai satu kesatuan siklus hidup karier ASN (Employee Lifecycle).

Lynn dkk. (2022) dalam tinjauannya mengenai Digital Public Services menyatakan bahwa digitalisasi mengubah esensi mendasar dari tata hubungan pelayanan publik (the public encounter) menjadi gerakan mandiri (citizen self-service). Dalam konteks birokrasi Indonesia, pergeseran ini diwujudkan melalui aplikasi MyASN. Mufarriyah & Anisykurlillah (2024) serta Khafidho dkk. (2026) dalam studi kasus di BKD Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa keberadaan layanan mandiri ini memberikan hak penuh kepada ASN untuk memantau berkas mereka secara real-time dan melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM). Hal ini menjawab kebutuhan psikologis dan profesional aparatur akan transparansi, terutama ketika status berkas mereka dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL).

Namun demikian, sintesis lintas-literatur ini juga mengungkap adanya gap (kesenjangan) yang lebar antara dasar kebijakan nasional dengan realitas kesiapan di tingkat lokal. Kajian komparatif global oleh Taufiqurokhman dkk. (2025) menggarisbawahi bahwa efektivitas digital governance di negara berkembang sangat bergantung pada kematangan infrastruktur digital dan kapasitas institusional yang adaptif. Di Indonesia, tantangan ini muncul dalam spektrum yang beragam, antara lain:

a. Hambatan Teknis Organisasional (Kategori Wilayah Maju/Perkotaan)

Di wilayah dengan infrastruktur yang relatif mapan, masalah yang mendominasi adalah stabilitas sistem dan kapasitas SDM operator. Utami & Jannah (2025) dalam evaluasi CIPP terhadap platform SIAP di Kota Bekasi mendapati penurunan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya stabilitas aplikasi daerah saat diintegrasikan dengan sistem nasional. Masalah kejenuhan sistem (system crash) saat traffic pengusulan tinggi juga dicatat oleh Fadillah (2025). Selain itu, Sandang dkk. (2025) di Morowali Utara serta Sirait dkk. (2024) di Humbang Hasundutan mengonfirmasi bahwa kesalahan input oleh operator lokal masih sering menjadi pemicu tingginya status BTL.

b. Kesenjangan Struktural Ekstrem (Kategori Wilayah Baru/Pedalaman)

Kontras dengan wilayah barat atau perkotaan, implementasi di wilayah otonom baru atau pedalaman menghadapi kesenjangan digital yang struktural. Studi kritis oleh Yikwa & Alfian (2025) di BKD Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, menunjukkan bahwa pilar Need-Based Holism maupun Reintegration belum dapat berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar yang ekstrem (listrik dan internet) serta rendahnya literasi komputer aparaturnya setempat. Kondisi ini selaras dengan ulasan komparatif regional oleh Fitriyanti (2024) serta tinjauan sistematis oleh Murdhani (2025) yang menegaskan bahwa tantangan terbesar SPBE di Indonesia adalah ketidakmerataan kapasitas infrastruktur telekomunikasi antarwilayah barat dan timur.

Secara teoretis, hambatan-hambatan ini terjadi karena transformasi digital bukan sekadar masalah adopsi perangkat lunak, melainkan rekonstruksi kultur kerja organisasi. Sangaji & Irianto (2025) mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang menuju pemerintahan digital menuntut perubahan kultur dari cara-cara manual-tradisional yang paternalistik menuju adopsi platform digital yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

SIASN sebagai Inovasi Digital Governance

Dalam diskursus administrasi publik modern, transformasi manajemen kepegawaian melalui platform SIASN tidak sekadar dipandang sebagai migrasi teknis dari sistem manual ke digital, melainkan sebagai sebuah inovasi digital governance yang fundamental. Sebagaimana didefinisikan dalam kerangka kerja konseptual oleh Hanisch dkk. (2023), digital governance melibatkan rekonstruksi mekanisme kontrol, koordinasi, dan kepercayaan melalui pemanfaatan teknologi secara terintegrasi. Dalam konteks ini, SIASN hadir sebagai bentuk inovasi tata laksana yang mengubah struktur hubungan kerja antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi pembina dan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai sebuah inovasi, efektivitas SIASN dapat diukur dari kemampuannya menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien. Kajian komparatif teoretis oleh Taufiqurokhman dkk. (2025) mengenai model pemerintahan digital di negara berkembang menegaskan bahwa keberhasilan inovasi sektor publik sangat bergantung pada kematangan regulasi dan kapasitas institusional yang adaptif. Di Indonesia, peluncuran Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang SIASN menjadi jangkar yuridis yang kuat. Inovasi ini, seperti yang diulas oleh Heriyanto (2022), memicu akselerasi penerapan e-government yang berorientasi pada nilai-nilai (pilar public value), yakni mewujudkan prinsip clean and good governance melalui transparansi proses bisnis kepegawaian yang nir kertas (paperless).

Manifestasi SIASN sebagai inovasi digital governance tercermin kuat pada kemampuannya menyelesaikan patologi birokrasi, seperti lambatnya pelayanan transaksional dan tingginya risiko manipulasi data. Bukti empiris dari studi Adi Frans Kawijaya dkk. (2025) di BKPSDM Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa SIASN mengubah proses bisnis kenaikan

pangkat dari interaksi manual yang memakan waktu bulanan menjadi hitungan hari melalui otomasi verifikasi data digital. Hal senada diperkuat oleh Syafa Kamila & Darmeinis (2024) pada Layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK) di BKN Pusat, di mana integrasi data mampu memangkas tumpang tindih administrasi secara radikal. Digitalisasi ini sejalan dengan argumen Sangaji & Irianto (2025) bahwa inovasi menuju pemerintahan digital menuntut pergeseran kultur kerja organisasi: dari cara-cara tradisional yang tertutup menuju adopsi platform yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

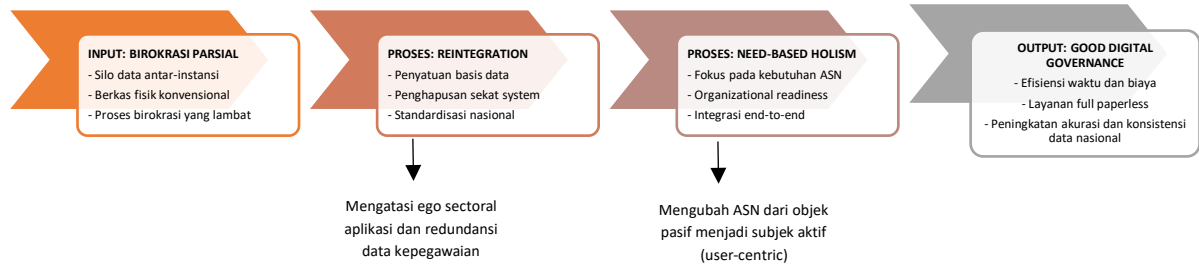
Namun demikian, sebagai inovasi yang diimplementasikan di negara kepulauan dengan tingkat perkembangan yang heterogen, SIASN menghadapi tantangan kesenjangan digital yang menjadi ciri khas digital governance di negara berkembang (Murdhani, 2025). Ketika wilayah barat atau perkotaan seperti Sidoarjo (Mufarriah & Anisykurlillah, 2024) dan Bekasi (Utami & Jannah, 2025) berfokus pada penyempurnaan stabilitas sistem digital (system crash dan traffic data), wilayah pedalaman seperti Mamberamo Tengah di Papua Pegunungan (Yikwa & Alfian, 2025) masih berjuang pada pemenuhan prasyarat dasar inovasi, yakni kestabilan daya listrik, jaringan internet, dan literasi komputer operator.

Secara teoretis, analisis ini menunjukkan bahwa SIASN sebagai inovasi digital governance telah berhasil menetapkan standar baru dalam efisiensi administrasi publik di Indonesia. Namun, keberlanjutan dan inklusivitas inovasi ini kedepannya membutuhkan pendekatan tata kelola yang tidak seragam, yang secara aktif memitigasi kesenjangan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia antarwilayah demi mencapai keadilan digital nasional.

Posisi Kebaruan Penelitian (Novelty) Berbasis Sintesis Literatur

Studi yang ada sebagian besar mengevaluasi implementasi SIASN dari konteks lokal tertentu dan terutama berfokus pada efektivitas teknis dalam layanan administrasi yang terisolasi. Studi yang terbatas secara sistematis mengintegrasikan implementasi SIASN dengan teori tata kelola era digital dalam konteks administrasi publik yang lebih luas. Studi ini berkontribusi dengan mengusulkan kerangka kerja konseptual yang disebut: Kerangka Kematangan Tata Kelola Digital SIASN. Kerangka kerja ini mengintegrasikan Reintegrasi, Holisme Berbasis Kebutuhan, Kesiapan Organisasi Tata Kelola Adaptif

Kerangka kerja yang diusulkan menjelaskan hasil implementasi yang bervariasi di berbagai wilayah sesuai dengan kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan kemampuan kelembagaan. Kontribusi konseptual ini memperluas penerapan teori Tata Kelola Era Digital ke dalam sistem manajemen personel publik di negara-negara berkembang.



Gambar 4. Kerangka Konseptual Tata Kelola Digital Adaptif Berbasis SIASN

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan melalui metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 literatur ilmiah yang mengkaji transformasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan gambaran besar dari tata kelola digital (digital governance), penelitian ini menarik beberapa kesimpulan mendasar, yaitu transformasi SIASN di Indonesia secara struktural dibingkai oleh pilar Reintegration (Reintegrasi) di sisi hulu. Pilar ini terbukti efektif meruntuhkan ego sektoral aplikasi (siloeled systems) dengan mengonsolidasikan basis data kepegawaian dari ratusan instansi daerah ke dalam satu sistem nasional yang terintegrasi di bawah otoritas BKN. Implementasi pilar ini berhasil menciptakan standardisasi prosedur, memotong rantai birokrasi transaksional secara radikal serta mewujudkan administrasi kepegawaian yang nirkertas (paperless) dan transparan. Integrasi di sisi hulu secara simultan mendorong pergeseran paradigma pelayanan di sisi hilir melalui pilar Need-Based Holism (Holisme Berbasis Kebutuhan). Melalui platform mandiri seperti MyASN, aparatur tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif birokrasi, melainkan sebagai subjek aktif yang dapat memantau siklus hidup kariernya (employee lifecycle) secara mandiri dan real-time. Hal ini memberikan kepastian layanan dan transparansi data, terutama dalam penyelesaian layanan kepegawaian yang berstatus Berkas Tidak Lengkap (BTL). Efektivitas implementasi kedua pilar ini di lapangan tidak berada pada satu titik yang seragam, melainkan membentuk sebuah spektrum berkelanjutan yang dipengaruhi oleh kesiapan wilayah. Instansi di wilayah perkotaan atau di Indonesia bagian barat berada pada fase penyelesaian hambatan teknis-organisasional (seperti stabilitas lalu lintas aplikasi SIASN dan akurasi input dari operator SIASN). Sebaliknya, instansi di wilayah otonom baru dan pedalaman (seperti Indonesia bagian timur) masih terjebak pada kesenjangan struktural ekstrem akibat minimnya infrastruktur dasar (listrik dan internet) serta rendahnya literasi digital aparatur. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola digital sangat bergantung pada kematangan infrastruktur geografis dan kultur adaptasi organisasi.

Berorientasi pada temuan-temuan di atas, maka dirumuskan beberapa saran strategis dan praktis yang dapat direkomendasikan bagi pengambil kebijakan maupun penelitian selanjutnya:

1. Saran Praktis dan Kebijakan (BKN dan Pemerintah Daerah)

Peningkatan Infrastruktur Berkeadilan dan Modul Luring (Offline Mode): Kementerian Kominfo bersama BKN perlu mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah otonom baru dan daerah terpencil. Untuk mengantisipasi hambatan geografis yang ekstrem, pengembang sistem SIASN disarankan membangun fitur sinkronisasi data semi-luring (hybrid/offline module) agar input data di daerah minim sinyal tetap dapat berjalan tanpa harus menunggu koneksi internet stabil. Standardisasi Pelatihan Kognitif Operator Kepegawaian: Guna menekan tingginya angka Berkas Tidak Lengkap (BTL) akibat kesalahan input (human error), BKPSDM di tingkat daerah wajib melaksanakan pelatihan teknis dan standardisasi kompetensi secara berkala bagi para operator instansi, khususnya setiap kali terjadi pembaruan fitur (system upgrade) pada aplikasi SIASN. Restrukturisasi Kultur Kerja dan Sosialisasi MyASN: Instansi pemerintah daerah perlu menggencarkan sosialisasi intensif mengenai pemanfaatan MyASN kepada seluruh pegawai secara masif. Langkah ini penting untuk mengubah kultur kerja aparatur dari pola ketergantungan manual terhadap pengelola kepegawaian menuju budaya literasi digital mandiri

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya (*Academic Agenda*)

Perluasan Metode Kuantitatif dan Pengujian Kepuasan: Mengingat tren penelitian saat ini masih didominasi oleh metode kualitatif deskriptif, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif empiris (seperti model SEM-PLS atau Technology Acceptance Model - TAM) untuk menguji secara statistik pengaruh kualitas sistem SIASN terhadap kepuasan kerja ASN secara nasional. Studi Kasus Khusus pada Wilayah Tertinggal: Diperlukan lebih banyak studi kasus mendalam yang berfokus pada strategi mitigasi digital divide (kesenjangan digital) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) guna memperkaya literatur tata kelola pemerintahan digital yang lebih inklusif di negara berkembang

REFERENSI

- Abdussamad, Z., Judijanto, L., Yusup, A., Husni Tamrin, A. M., Rosyalita, D., & Sari Rahayu, H. W. (2024). Enhancing Public Service Delivery through Digital Transformation: Challenges and Opportunities in the Era of E-Government. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(2).
- Akil, M. A. (2024). Digital Governance-Model Baru Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Administrasi Publik.
- Asari, A., Widiana, I., Nur, S., Muniarty, P., Lotaningrat, D., Rijal, S., ... & Muslimin, M. (2023). Manajemen inovasi.

- Badan Kepegawaian Negara. (2025). BKN mempermudah proses usul dan penetapan status kepegawaian cukup melalui SIASN. BKN. <https://www.bkn.go.id/bkn-mempermudah-proses-usul-dan-penetapan-status-kepegawaian-cukup-melalui-siasn/>
- Badan Kepegawaian Negara. (2025). Optimalkan layanan bagi ASN, BKN tingkatkan sinergitas proses bisnis data kepegawaian. BKN. <https://www.bkn.go.id/optimalkan-layanan-bagi-asn-bkn-tingkatkan-sinergitas-proses-bisnis-data-kepegawaian/>
- Budiyanto, M. N., et al. (2025). Digital Transformation and Public Value Creation in Public Administration. IAPA Proceedings Conference, pp. 258-272.
- Danu, D. E. A., Supardi, S., Sutanto, S. T. J. P., & Riko, R. S. (2023). E-Services: Implementation of Digital-Based Public Services in The 4.0 Era. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 1(3), 87-92. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i3.40>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public management is dead-long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory* 16(3): 467-94.
- Fadillah, A.N.V. (2025). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88474>
- Fitriyanti, E. (2024). The effect of digital transformation on governance in Indonesia: a case study of e-government implementation in public services. *Journal of Political Innovation and Analysis*, 1(1), 26-32. <https://doi.org/10.59261/jpia.v1i1.3>
- Hanisch, M., Goldsby, C. M., Fabian, N. E., & Oehmichen, J. (2023). Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research*, 162,113777. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777>
- Heeks, R. (2001). *Understanding e-governance for development*. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi penerapan e-government dalam pelayanan publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 129-138.
- Indrarto, P. A. (2025). *Digital Governance yang Partisipatif: Peran Publik, Kepemimpinan Digital, dan Pengawasan Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Iqbal, M., & Marta, A. (2024). Reformasi birokrasi melalui inovasi sistem informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). *Jurnal Niara*, 17(2), 348-359. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.19817>
- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance: Doing more with less. *Government Information Quarterly*, 30(1), S1-S8.
- Kawijaya, A. F., A, A. S., & Sawaji, J. (2025). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian Dan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. Poma Jurnal: Publish Of Management, 2(2), 85-102. <https://doi.org/10.47354/poma.v2i2.1021>
- Khafidho, Y., Fanidah, E. H., Meirinawati, & Nourmanita, N. A. (2026). Efektivitas layanan digitalisasi pada aplikasi SIASN dalam proses usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Media Akademik, 4(2). <https://doi.org/10.62281/jk9jc938>
- Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering—a tertiary study. Information and software technology, 52(8), 792-805. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006>
- Lips, M. (2019). Digital government: Managing public sector reform in the digital era. Routledge.
- Lynn, T., Rosati, P., Conway, E., Curran, D., Fox, G., & O’Gorman, C. (2022). Digital public services. In Digital Towns: Accelerating and Measuring the Digital Transformation of Rural Societies and Economies (pp. 49-68). Cham: Springer International Publishing.
- Marasut, Y. A., Liando, D. M. ., & Monintja, D. K. . (2025). The Existence of the State Civil Apparatus Information System (SIASN) in the Process of Determining the Decree on Promotion of Civil Servants in Agencies in the Work Area of the Regional Office XI BKN Manado. Journal of Public Representative and Society Provision, 4(2), 30-39. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v4i2.489>
- Mufarrijah, S., & Anisykurlillah, R. (2024). Implementasi kebijakan layanan kenaikan pangkat berbasis SIASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Journal Publicuho, 7(4), 2389-2399.
- Murdhani. (2025). The implementation of digital governance in Indonesia: A systematic review of challenges and opportunities. International Journal of Scientific Research, 2(1), 26-36. <https://doi.org/10.62894/hw14ch33>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- Sandang, V., Bahri, S., & Juharni. (2025). Evaluasi implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada pelayanan administrasi kepegawaian ASN Kabupaten Morowali Utara. Paradigma Journal of Administration, 3(2), 122-127. <https://doi.org/10.35965/pja.v3i2.7648>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital. Jejaring Administrasi Publik, 17(1), 54-70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Sirait, J. O., Panjaitan, F., & Manalu, D. (2024). Implementasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan. Jurnal Kebijakan Publik dan Governansi, 1(1), 12-22.

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 81-103

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.533>

- Syafa Kamila Ardyaputri, & Darmeinis Darmeinis. (2024). Peran Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK dalam Mendukung Efisiensi Operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN). *Jurnal Riset Manajemen*, 2(3), 425–454. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i3.2301>
- Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Andriyani, L., Usni, U., & Ulum, M. (2025). Digital governance models in developing countries and the effectiveness of public services. *Citizen and Government Review*, 2(2), 172-189. <https://cjrjournal.com/index.php/cgr/article/view/19>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- United Nations. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development*. New York: Department of Economic and Social Affairs.
- Van Deursen, A. J. (2024). Digital Inequality in the Age of Artificial Intelligence. *Computers in Human Behavior*, 151, 108015
- Utami, R. C. I., & Jannah, L. M. (2025). Evaluation of the E-Government Policy for the Civil Service Information System (Siap) in the Bekasi City Government Environment. *Economic: Journal Economic and Business*, 4(4), 817-822. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v4i4.1340>
- Wibawa, S. (2022). *Administrasi publik dan e-government*.
- Yikwa, R. D., & Alfian, Y. (2025). Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24535>
- Yong, J. S. L. (2003). *E-government in Asia: Enabling public service innovation in the 21st century*. Times Editions.